

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Konstruktivisme Hukum Kelautan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Indonesia Guna Mencapai Poros Maritim Dunia” ini ditulis oleh Addriana Della Nasution, NIM. 1860103225319, Program Studi Hukum Tata Negara, fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum, dengan pembimbing Yusron Munawir, M.H.

Kata Kunci: Ekonomi Biru, Konstruktivisme, Poros Maritim Dunia

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan potensi maritim yang sangat besar belum sepenuhnya mampu mengoptimalkan sumber daya laut untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan posisi strategisnya sebagai Poros Maritim Dunia. Fragmentasi regulasi, tumpang tindih kewenangan kelembagaan, serta lemahnya perlindungan terhadap hak-hak masyarakat pesisir menjadi hambatan struktural dalam sistem hukum kelautan nasional saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pendekatan konstruktivisme hukum dapat digunakan untuk membentuk sistem hukum kelautan yang terintegrasi, inklusif, dan berbasis keadilan ekologis.

Rumusan masalah yang diangkat adalah 1) Bagaimana problematika yuridis hukum kelautan Indonesia dalam mendukung visi Poros Maritim Dunia? 2) Bagaimana disharmoni regulasi dan tumpang tindih kewenangan kelembagaan memengaruhi efektivitas penegakan hukum kelautan di Indonesia? dan 3) Bagaimana pendekatan konstruktivisme hukum dapat digunakan untuk membangun sistem hukum kelautan yang lebih harmonis, berkeadilan, dan berkelanjutan?

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan analisis terhadap regulasi sektoral seperti UU Perairan, UU Kelautan, UU Perikanan, UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan UU Cipta Kerja. Teknik analisis data menggunakan pendalaman atas konstruksi hukum terhadap dokumen-dokumen serta seluruh sumber data terkait dan menarik kesimpulan.

Hasil Penelitian yang didapatkan yaitu: 1) Sistem hukum kelautan nasional terbukti masih bersifat sektoral, tumpang tindih, dan tidak terintegrasi, sehingga melemahkan efektivitas pengelolaan wilayah laut dan perlindungan masyarakat pesisir. 2) Ketentuan dalam berbagai undang-undang sektoral seperti UU Perikanan, UU Kelautan, UU Pelayaran, dan UU Cipta Kerja tidak selaras satu sama lain, serta tidak menjamin partisipasi masyarakat pesisir secara substantif. 3) Ketiadaan lembaga tunggal pengelola maritim menyebabkan disorganisasi kewenangan, lemahnya koordinasi, serta pelanggaran prinsip efektivitas dan akuntabilitas dalam tata kelola kelautan nasional. 4) Dalam membentuk desain ideal hukum kelautan

nasional, penulis menghasilkan gagasan perlunya Undang-Undang Maritim Nasional (UUMN) dan pembentukan Badan Otorita Maritim Nasional (BOMN) sebagai lembaga tunggal yang memiliki empat deputi bidang untuk menjalankan fungsi pengelolaan laut, ekonomi biru, pertahanan dan keamanan, serta pemberdayaan masyarakat secara terintegrasi.

ABSTRACT

The thesis entitled “Legal Constructivism of Maritime Law Toward the Welfare of Indonesian Society to Achieve the World Maritime Axis”, was written by Addriana Della Nasution, NIM 1860103225319, Constitutional Law Study Program, Faculty Of Sharia and Law, supervised by Yusron Munawir, M.H.

Keywords: Blue Economy, Legal Constructivism, World Maritime Axis

Indonesia, as the largest archipelagic state with vast maritime potential, has yet to fully optimize its marine resources to achieve both national welfare and its strategic vision as the World Maritime Axis. Regulatory fragmentation, overlapping institutional mandates, and the weak protection of coastal community rights remain structural obstacles within Indonesia’s current maritime legal system. This study aims to analyze how the legal constructivism approach can be used to develop an integrated, inclusive, and ecologically just maritime legal system.

The research questions posed are: 1) What are the juridical problems of Indonesia’s maritime law in supporting the vision of the World Maritime Axis? 2) How do regulatory disharmony and overlapping institutional mandates affect the effectiveness of maritime law enforcement in Indonesia? 3) How can the legal constructivism approach be applied to build a more harmonious, just, and sustainable maritime legal system?

This study employs a normative juridical method using conceptual and statutory approaches. Data were collected through literature review and analysis of sectoral regulations such as the Law on Waters, the Law on Maritime Affairs, the Law on Fisheries, the Law on the Management of Coastal Areas and Small Islands, and the Job Creation Law. Data analysis was conducted through legal construction and interpretation of relevant documents and sources.

The research results obtained are: 1) Indonesia’s maritime legal system remains sectoral, fragmented, and unintegrated, thereby weakening the effectiveness of ocean governance and the protection of coastal communities. 2) Provisions in various sectoral laws such as the Law on Fisheries, Maritime Affairs, Shipping, and the Job Creation Law are inconsistent and fail to guarantee substantive participation of coastal communities. 3) The absence of a unified maritime authority leads to disorganized mandates, weak inter-agency coordination, and violations of the principles of effectiveness and accountability in maritime governance. 4) In forming the ideal design of national maritime law, the author produced the idea of the need for a National Maritime Law (UUMN) and the establishment of the National Maritime Authority Agency (BOMN) as a single institution with four deputy fields to carry out the functions of marine management,

blue economy, defense and security, and community empowerment in an integrated manner.